

2025

Minggu ke-1 November (3 s.d. 9 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Ekkuinbang, Komisi IV



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

URGENSI PELESTARIAN SPESIES TERANCAM PUNAH INDONESIA

Masyithah Aulia Adhiem
Analis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional diperlakukan setiap tanggal 5 November, dan pada tahun 2025 mengusung tema "Pulihkan Keanekaragaman Hayati, Lestarikan Kehidupan Bumi". Tema ini menjadi pengingat bagi Indonesia mengenai pentingnya melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari kekayaan dan identitas nasional. Sebagai salah satu negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki banyak tumbuhan dan satwa khas dan endemik. Upaya pelindungan dan pelestarian satwa dan tumbuhan terancam punah merupakan bagian tidak terpisahkan dari peta jalan pembangunan Indonesia. Hilangnya satu spesies saja dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi ketahanannya terhadap berbagai perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim. Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), misalnya, dikenal sebagai spesies indikator yang sensitif terhadap disfungsi habitat, dan kini statusnya terancam punah dengan populasi di alam hanya sekitar 500 pasang. Selain itu, banyak spesies lain yang masuk dalam kategori terancam punah berdasarkan Daftar Merah (*Red List*) The International Union for Conservation of Nature (IUCN). World Wildlife Fund (WWF) bahkan mencatat empat dari sepuluh satwa paling terancam punah (*most endangered*) di dunia berasal dari Indonesia, yaitu Trenggiling Sunda (*Manis javanica*); Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatræ*); Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*); dan Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*).

Ancaman terbesar bagi kelestarian spesies masih banyak bersumber dari aktivitas manusia. Perambahan hutan, alih fungsi lahan, hingga perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa terus saja terjadi. Di Aceh, misalnya, praktik perdagangan satwa liar ilegal masih marak dan terorganisir. Bahkan, praktik perdagangan ilegal ini terhubung dengan jaringan internasional seperti Malaysia, Thailand, hingga Timur Tengah. Kasus lain adalah temuan Bea Cukai Batam atas paket kiriman yang berisi bagian dari satwa dilindungi, seperti 10 paruh burung rangkong gading dan 43 taring beruang madu. Komitmen penegakan hukum atas pelanggaran serupa menjadi tugas besar bersama seluruh pihak. Guna mengatasi ancaman terhadap spesies terancam punah akibat kegiatan manusia dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Pelestarian spesies tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah populasi atau menurunkan status keterancaman dalam Daftar Merah IUCN, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem secara menyeluruh. Beberapa langkah strategis perlu diperkuat. Pertama, mendorong implementasi Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2025—2045 (Indonesia Biodiversity Action Plan/IBSAP) sebagai peta jalan nasional pelindungan sumber daya hayati. Implementasinya perlu melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga ilmu pengetahuan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, menyediakan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan konservasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) memperkuat dasar hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana agar penegakan hukum dapat berjalan konsisten dan efektif.

2025

Minggu ke-1 November (3 s.d. 9 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang EKKUINBANG, Komisi IV

Ketiga, mendorong kemitraan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Contoh keberhasilan konservasi yang melibatkan semua pihak adalah konservasi Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) melalui program penangkaran, pelepasliaran, dan peminjaman satwa kepada masyarakat hingga populasinya meningkat. Keberhasilan tersebut juga mendorong upaya serupa pada burung perkici dada merah (*Trichoglossus forsteni*). Komisi IV DPR RI juga telah memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang telah berhasil melakukan repatriasi 40 burung perkici dada merah dari Paradise Park, Inggris, ke habitat asalnya di Bali pada Oktober 2025. Melihat urgensinya, upaya pelestarian spesies terancam punah harus terus diperkuat. Kegagalan konservasi tidak hanya berarti hilangnya kekayaan alam, tetapi juga mengancam keseimbangan ekologis dan potensi sumber daya genetik yang penting bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Atensi DPR

Pelindungan dan pelestarian satwa dan tumbuhan Indonesia merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen bersama. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat sebagai pelaksana konservasi di lapangan. Komisi IV DPR RI memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pelestarian spesies terancam punah Indonesia. Melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan pemerintah menyediakan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi program pelestarian sumber daya alam hayati, khususnya spesies terancam punah. Komisi IV DPR RI juga perlu mendorong mitra kerja terkait untuk segera membuat peraturan pelaksana dari UU KSDAHE agar implementasinya berjalan efektif. Guna memastikan efektivitas kebijakan, maka Komisi IV DPR RI dapat melakukan pengawasan melalui Rapat Kerja dengan mitra kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat dan organisasi konservasi, serta melakukan Kunjungan Kerja ke berbagai lokasi konservasi. Selain itu, juga dapat mendorong pemerintah memperluas kerja sama dengan negara lain dalam konteks pelaksanaan kegiatan konservasi.

Sumber

cnbcindonesia.com, 4 Oktober 2025;
ipb.ac.id, 2 Juli 2025;
iucnredlist.org; Maret 2025;
kehutanan.go.id, 27 Oktober 2025;
Kompas, 5 dan 6 November 2025;
kompas.com, 5 November 2025;
sumatra.bisnis.com, 6 November 2024;
theacehpost.com, 6 November 2025; dan
wwf.org.uk, 29 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making